

**ANALISIS KINERJA PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN
DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN MALANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi**



Oleh :

Novia Indrawati Ina

Nim : 2016110155

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI
MALANG**

2020

RINGKASAN

Pembangunan adalah salah satu upaya atau kinerja yang dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Jika pembangunan di daerah dilakukan secara merata, maka kesejahteraan hidup masyarakat otomatis meningkat dan tercapai. Untuk meningkatkan daya dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah, hal yang perlu dilakukan yaitu perluasan otonomi di masing-masing daerah terutama dalam hal pelayanan dan pembangunan daerah, karena otonomi daerah merupakan salah satu sistem yang digunakan pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan hidup masyarakat. Salah satu sumber pendapatan daerah adalah pajak. Dalam hal mengatur dan mengelola rumah tangga daerahnya sendiri, pajak merupakan salah satu sumber pendapatannya dan juga yang berkontribusi dalam pembangunan daerah. Untuk mensukseskan pembangunan daerah tidak lain dari kontribusi setiap pajak daerah yang ada. Oleh karena itu daerah diharapkan mampu meningkatkan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat.

Kata kunci; pajak penerangan jalan, pajak daerah, pendapatan asli daerah, kabupaten malang

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan adalah upaya atau kinerja yang diusahakan Pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Jika pembangunan dilaksanakan secara merata, maka kesejahteraan hidup masyarakat akan tercapai. Sehubungan dengan ditetapkannya UU No 32 Tahun 2004, otonomi daerah dapat diperluas agar pemerintah mempunyai kewenangan yang luas dalam mengelola dan mengatur rumah tangga daerahnya masing-masing. Tanggung jawab pemerintah daerah akan lebih besar daripada era sentralistik jika terdapat pemberian wewenang dari pemerintah kota terhadap pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya dengan lebih baik. (Ignatius, 2010:1)

Dalam hal ini salah satu tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Otonomi juga dapat memberikan kewenangan untuk mengelola dan mengurus keuangan daerahnya dengan baik melalui desentralisasi fiskal. Kemandirian pemerintah daerah adalah salah satu tuntutan otonomi untuk melaksanakan desentralisasi fiskal dengan lebih bertanggungjawab dan bijak. (Agustinus, 2015)

Untuk mempercepat terciptanya kesejahteraan hidup masyarakat, salah satu sistem yang dilakukan pemerintah yaitu pelaksanaan atau pembangunan otonomi yang terealisasi sesuai perencanaan. Untuk mencapai fungsi tersebut, salah satu hal yang dilakukan pemerintah daerah adalah adanya dukungan dengan kemampuan keuangan daerah yang baik. Selain perolehan bantuan dari pemerintah pusat, juga memperoleh bantuan dari hasil daerah untuk melakukan pembangunan dan membiayai penyelenggaraan pemerintah. Salah satunya yaitu pendapatan yang

diperoleh dari hasil pajak. Oleh karena itu, semakin besar sumber pendapatan yang berasal dari potensi daerah, diharapkan agar semakin mampu meningkatkan pembangunan daerahnya sesuai kebutuhan masyarakat. Salah satu sumber untuk mensukseskan pembangunan daerah tidak lain dari kontribusi setiap pajak daerah yang ada. Salah satu pajak daerah yang mampu mengembangkan pendapatan atau potensi daerah dan atau berkontribusi lebih banyak adalah pajak penerangan jalan.

1.2 Rumusan Masalah

Peneliti mengambil rumusan masalah dengan berdasarkan latar belakang diatas yaitu:

1. Apakah ada perkembangan kinerja pemungutan Pajak Penerangan Jalan dalam meningkatkan penerimaan dan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2015 sampai 2019?
2. Apakah ada permasalahan kinerja pemungutan Pajak Penerangan Jalan dalam meningkatkan penerimaan dan Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2015 sampai 2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana kinerja pemungutan Pajak Penerangan Jalan dalam meningkatkan penerimaan dan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Malang Tahun 2015 sampai 2019.
2. Untuk mengetahui permasalahan yang ada dalam kinerja pemungutan PPJ dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Malang Tahun 2015 sampai 2019

1.1 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

1. Pemerintah Kabupaten Malang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat Bermanfaat dan berguna sebagai bahan informasi atau evaluasi dalam perencanaan atau kebijakan dalam waktu akan datang yang akan dipakai oleh pemerintah Kabupaten Malang untuk lebih meningkatkan kinerja dalam melakukan pemungutan PPJ dan PAD.

2. Universitas

Diharapkan hasil penelitian ini menjadi salah satu acuan atau informasi bagi universitas, khususnya para mahasiswa atau pembaca lainnya yang membutuhkan informasi atau referensi yang berkaitan dengan pajak daerah khususnya pajak penerangan jalan.

3. Penulis

Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan teori-teori yang telah diperoleh di bangku kuliah kedalam objek yang sesungguhnya khususnya yaitu Pemungutan Pajak Penerangan Jalan dalam Meningkatkan Penerimaan dan Pendapatan Asli Daerah.

4. Pembaca

Diharapkan hasil penelitian ini dapat membantu para pembaca dalam mengembangkan wawasan dan pengetahuannya khusus yang berkaitan dengan pajak daerah

DAFTAR PUSTAKA

- Adissya, Ispriyarso. *et al.* 2019. *Desentralisasi Fiskal Dan Otonomi Daerah Di Indonesia*.Jurnal. 15(1)
- Andriani, Purnawan. *et al.* 2017. *Eksistensi Pengaturan Pajak Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah*. Jurnal Hukum Khairah Ummah. 12(1)
- Agustinus.dkk. 2015. *Potensi Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Yahukimo*. Jurnal Keuda 2(3)
- Bahar, Ujang. 2009. *Otonomi Daerah Terhadap Pinjaman Luar Negeri Antara Teori dan Praktik*.PT Indek . Jakarta.
- Darise, Nurlan. 2009. *Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan BLU*.Edisi Kedua.PT. Macana Jaya Cemerlang. Jakarta.
- Direktorat Jenderal pajak. 2017. *Pajak penerangan jalan*. <https://bprd.jakarta.go.id>. (diakses 16 desember 2019)
- Fokusmedia, Tim Redaksi. 2006. *Undang-Undang Otonomi Daerah*. Fokusmedia. Malang
- Hajar Solikah. 2017. *Analisis Kinerja dan Potensi Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Karanganyar*. Skripsi. Universitas Sebelas Maret Surakarta
- Ignatius, Pratama.*et al.* 2010. *Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah*.Skripsi.Universitas Sanhata Darma Yogyakarta.
- Jenni, H. Putri. 2018. *Kontribusi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan, Pajak Air Tanah Serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cianjur*. Skripsi. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
- Mariyah. 2016. *Analisis Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Aceh Barat*. Skripsi. Universitas Teuku Umar Meulaboh Aceh Barat.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Edisi terbaru. Yogyakarta: Andi Offset
- Nita Ayu Oktaviana, dkk. 2015. *Upaya Dinas Pendapatan Daerah Dan PLN Dalam Meningkatkan Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah*.Jurnal Ilmiah

- Paulina N.K.V. Cristanti. (2015). *Analisis Pendapatan Pajak Penerangan Jalan Dan Reklame Ditinjau Dari Perbandingan Tahun Ke Tahun Serta Prediksinya*. Skripsi. Universitas Santa Dharma Jogjakarta
- Prasetyo Agung. 2016. *Pengertian deskriptif kualitatif*. <https://www.linguisti.com> (diakses 23 Desember 2019)
- Pengerapan, T. Resita, dkk. 2018. *Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Halmahera Utara*. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern. 13(3): 165-173.
- Rindiantika, A. Istighfarin. 2013. *Analisis Potensi Pajak Penerangan Jalan Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Di Kabupaten Sidoarjo*. Skripsi. Universitas Negeri Surabaya.
- Riedel S.M Monginsidi. 2013. *Analisis Penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Dinas Pengelola Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah di Kabupaten Minahasa*. Jurnal Emba.1 (4)
- Sugiyono. 2018. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&B*. Bandung: Alfabeta, cv
- Senorita, D Suluh. *Subjek dan objek penelitian*. <https://www.academia.edu>. (diakses 23 desember 2019)
- Undang-undang Republik Indonesia No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Usman Regina. 2015. *Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)*. Jurnal Ilmiah